

Narasi Media Dalam Proses Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Bengkalis

Dia Meirina*¹ Muhammad Faisal Amrillah²

^{1,2}Universitas Islam Riau

Korespondensi : diameirinasuri@soc.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari narasi kebijakan yang dikemukakan oleh aktor pada media dalam mempengaruhi proses kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi permasalahan secara global sehingga dibutuhkan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan. Ada banyak aktor dan kelompok kepentingan yang mencoba mempengaruhi pembuatan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Tulisan ini merujuk teori Narrative Policy Framework yang menyatakan bahwa narasi berperan dalam proses kebijakan dengan melihat masalah kebijakan, karakter dari aktor, dan solusi kebijakan yang ditawarkan. Data diambil dari media lokal dan nasional yang dapat dipercaya, data yang relevan dengan penelitian kemudian dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus dengan fitur Ncapture. Hasil penelitian menemukan bahwa narasi yang dikemukakan aktor-aktor kebijakan yang menarasikan masalah kebijakan dan solusi kebijakan pada media memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kata kunci: Narasi media, Kebijakan, Proses kebijakan, Kebakaran hutan dan lahan.

Abstract

This paper aims to study the policy narratives put forward by actors in the media in influencing the policy process for controlling forest and land fires. Forest and land fires have become a global problem, so policies that directly address the problem are needed. Many actors and interest groups are trying to influence the policy-making of forest and land fire control. This paper refers to the Narrative Policy Framework theory, which states that narrative plays a role in the policy process by looking at policy problems, the character of the actors, and the policy solutions offered. Data is taken from reliable local and national media. Data relevant to the research is then collected using the Nvivo 12 plus application with the Ncapture feature. The study results found that the narratives put forward by policy actors who narrated policy problems and policy solutions to the media influenced policymaking for forest and land fire control.

Keyword: Media narrative, Policy, Policy process, Forest and land fires.

1. PENDAHULUAN

Terjadinya peristiwa kebakaran pada hutan serta lahan secara alami ataupun disengaja yang dilakukan manusia dapat terlihat dari adanya penjaran api dengan bebas dan menghabiskan apa saja yang bisa terbakar di dalam hutan (Sulistyowati, 2017). Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman utama bagi ekosistem (Rasyid, 2014), untuk mengatasinya maka dibutuhkan pemahaman yang tepat yang merupakan kunci penting untuk pengelolaan bahaya kebakaran dan implikasi ekologi (Hino, 2014). Faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan kebakaran hutan dan lahan adalah, populasi lokal yang tinggi, akses jalan, kebijakan pemerintah yang mengizinkan penggunaan hutan sebagai lahan

pertanian, kurangnya penegakan perlindungan, dan musim kemarau yang mendukung pembakaran yang ekstensif (Budiningsih, 2017).

Kebakaran hutan dan lahan mengarahkan kelompok kepentingan, pemimpin pemerintah, pembuat kebijakan, media berita, atau anggota masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, atau untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah yang menuntut untuk dicarikan solusi setelah kegagalan dari kebijakan yang sudah ada (Knackmuhs, Farmer, & Knapp, 2020). Narasi yang dibentuk pada media dapat meningkatkan perhatian pada masalah kebijakan, para aktor kebijakan yang menginginkan perubahan dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk secara aktif memobilisasi dalam mendukung kebijakan baru yang menguntungkan (Crow et al., 2017). Dengan narasi yang dibentuk pada media, aktor kebijakan dapat menawarkan solusi yang mereka inginkan untuk mengurangi dampak terhadap bahaya dari kebakaran hutan di masa depan yang bisa saja meluas ke permasalahan lainnya.

Aktor-aktor kebijakan mendefinisikan secara strategis suatu permasalahan seperti terjadinya bencana sebagai masalah dengan penyebab tertentu. Karena definisi masalah kebijakan sangat terkait dengan solusi yang dipilih untuk mengatasi masalah (Ceccoli, 2019), aktor-aktor yang berkepentingan menyampaikan kebijakan dengan narasi yang meyakinkan sehingga lebih memungkinkan untuk berhasil dalam menyampaikan solusi kebijakan sesuai dengan keinginan mereka (Shanahan, Jones, & McBeth, 2018). Akan tetapi, para aktor ini dapat mengalami beberapa masalah yang sama yang dihadapi oleh koalisi dalam upaya mereka untuk mempengaruhi proses kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti keinginan untuk menunjukkan empati terhadap para korban pada saat atau setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pemangku kepentingan, sebagaimana dikonsepsi oleh (Knackmuhs et al., 2020) mungkin juga berusaha untuk mempengaruhi sifat dari debat kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui konstruksi naratif. Aktor-aktor ini mencurahkan upaya, sumber daya, dan keahlian untuk mempromosikan perubahan kebijakan ke arah yang mereka sukai, seringkali dengan mencoba menghubungkan solusi kebijakan yang sudah jadi dengan masalah kebijakan yang muncul. Hal ini sejalan dengan pendapat (Jones & Radaelli, 2015) yang mengatakan bahwa narasi kebijakan adalah kisah yang diceritakan oleh aktor kebijakan yang membantu mendefinisikan masalah kebijakan atau mengadvokasi solusi kebijakan.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau, penerapan NPF akan melihat narasi aktor pada media yang mempengaruhi proses kebijakana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, oleh sebab itu NPF menjelaskan bagaimana suatu kelompok menggunakan narasi kebijakan dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan publik atau pada bagaimana individu dipengaruhi oleh narasi kebijakan. Kebakaran hutan dan lahan mengarahkan kelompok kepentingan, pemimpin pemerintah, pengusaha kebijakan, media, atau anggota masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, atau untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah yang berpotensi mengarah pada pencarian solusi setelah kegagalan kebijakan yang ada.

Penelitian ini difokuskan pada narasi yang dikemukakan oleh aktor dari partai politik, aktor dari LSM, Aktor dari swasta dan aktor dari tokoh masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dan bagaimana narasi tersebut memberikan pengaruh dalam proses kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penggunaan NPF dalam penelitian kebijakan adalah untuk menjawab pertanyaan tentang peran yang dimainkan oleh aktor pada narasi media dalam proses kebijakan publik, yang dijelaskan sesuai dengan elemer NPF yang terdiri dari masalah kebijakan, karakter dan solusi kebijakan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Narrative Policy Framework*, atau kerangka kerja kebijakan naratif yang di disingkat dengan NPF. NPF merupakan metode penelitian menggunakan dokumen-dokumen kebijakan dan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, baik dalam bentuk pidato, surat kabar, laporan media, dokumen hasil rapat untuk mengetahui pendapat dan perilaku dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

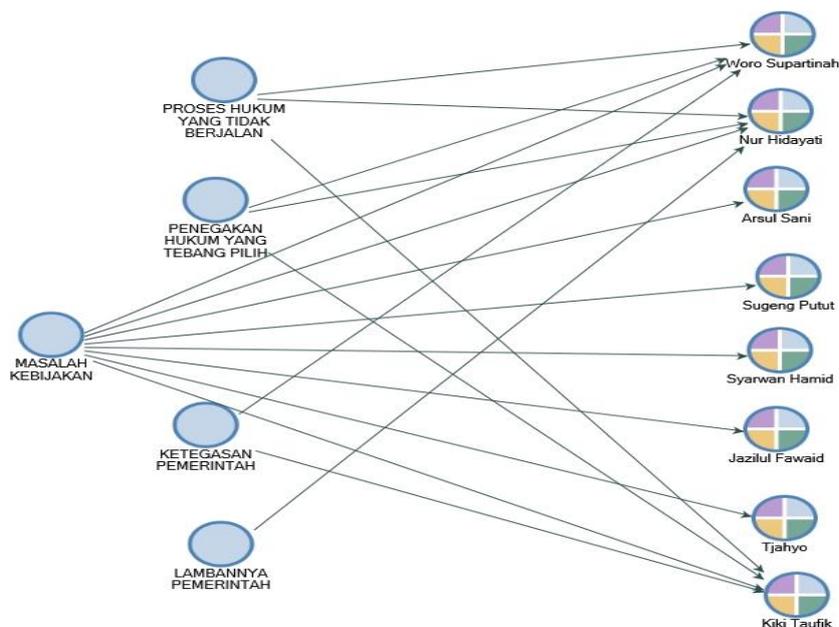
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis narasi kebijakan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada Tribun Pekanbaru, Media Indonesia dan Kompas. Fokus analisis pada masalah kebijakan, solusi kebijakan dan karakter yang digambarkan dalam narasi yang ada pada media tersebut. Elemen narasi dalam penelitian NPF ini disajikan sebagai berikut:

Masalah Kebijakan

Melihat masalah kebijakan dapat memudahkan dalam mencari solusi kebijakan dari kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga alternatif-alternatif kebijakan akan semakin mudah untuk didapatkan. Masalah kebijakan dapat ditemukan dalam narasi kebijakan yang dikemukakan oleh aktor-aktor kebijakan, pembuat keputusan, dan tokoh masyarakat. Menurut Shanahan, inti dari narasi kebijakan adalah diskusi mengenai masalah dalam kebijakan. Dengan melakukan identifikasi masalah kebijakan, maka akan lebih mudah membangun plot dan pengaturan yang merupakan elemen penting dalam penelitian NPF. Masalah kebijakan dapat diselesaikan dengan membuat kebijakan sehingga permasalahan yang selalu terjadi dapat segera teratasi. Masalah kebijakan dapat ditemukan dengan adanya pengakuan dalam sebuah narasi, hal ini inilah yang akan dianalisis sehingga akan memudahkan dalam penentuan masalah dan solusi kebijakan yang akan diputuskan.

Dalam melihat narasi dan mengkategorikan masalah kebijakan, hal yang penting untuk dilakukan adalah melihat siapa yang menarasikan permasalahan tersebut dan untuk kepentingan apa, sehingga elemen karakter juga akan terlihat dari narasi tersebut.



Gambar 1. Masalah kebijakan

Masalah kebijakan yang dibicarakan dalam narasi banyak membahas mengenai proses hukum yang tidak berjalan terhadap pelaku pembakaran, perusahaan-perusahaan yang menjadi tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan tidak ditindak dengan tegas. Selain itu narasi mengenai penegakkan hukum yang tebang pilih juga banyak ditemukan pada media, masalah ini dinarasikan oleh aktor-aktor kebijakan, LSM dan dari aktor politik. Penegakkan hukum yang tebang pilih disebutkan karena proses hukum terhadap pelaku perorangan berjalan dengan cepat sedangkan proses hukum terhadap tersangka korporat berjalan lambat. Ketegasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan juga ditemukan pada media, narasi yang ditemukan mengenai kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

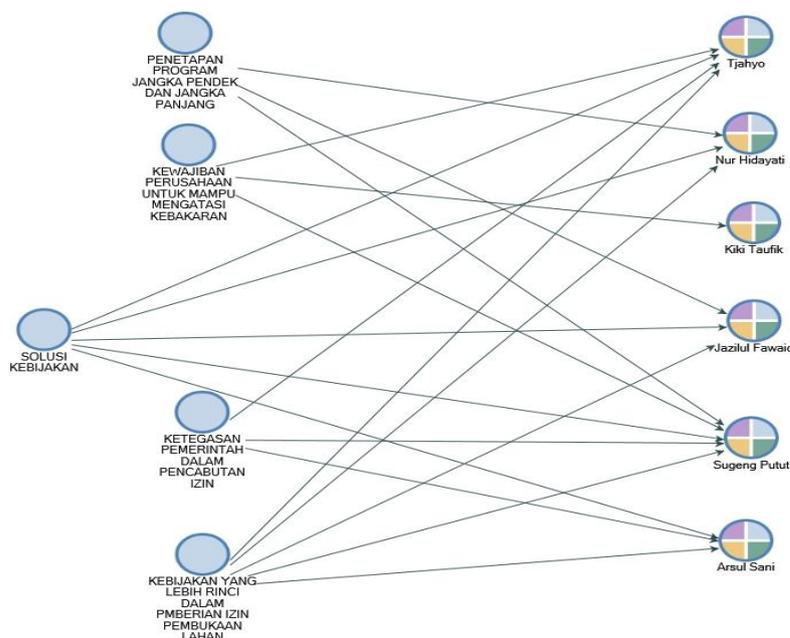
Masalah kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan juga ditemukan pada narasi yang disampaikan oleh Kepala BNPB Junjung Tambunan, bahwasanya apabila Kepala Daerah belum memutuskan status darurat bencana, maka BNPB tidak dapat menurunkan sumberdaya ke lokasi kebakaran, masalah kebijakan ini selalu menjadi kendala setiap ada kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi, karena daerah yang akan merasakan dampaknya.

Bantuan sumberdaya manusia dan finansial tidak akan mencukupi apabila Kepala Daerah tidak segera menetapkan status tanggap darurat, hal ini akan berimbas ke proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Aktor-aktor yang menarasikan masalah kebijakan akan langsung di kodekan dalam karakter, aktor yang membahas mengenai masalah dan solusi kebijakan akan masuk dalam kategori pahlawan, aktor yang berbicara atau dibicarakan dalam narasi sebagai pelaku pembakaran akan masuk dalam kategori penjahat, begitu juga aktor yang melindungi pelaku pembakaran juga akan dikategorikan sebagai penjahat. Karakter korban banyak didapatkan dari narasi masyarakat mengenai kerugian-kerugian yang mereka dapatkan karena adanya asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Masalah kebijakan yang ditemukan berupa tindakan yang dilakukan seperti pembakaran hutan dan lahan secara sengaja, penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan, ditemukannya narasi yang mengatakan bahwa adanya hakim yang tidak memiliki sertifikat hakim lingkungan dalam memutuskan permasalahan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga hasil yang diputuskan tidak sesuai dengan yang tuntutan jaksa, masyarakat menilai seperti ada perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Selain itu adanya masalah dalam peraturan menteri lingkungan hidup mengenai larangan perambahan dan pengolahan hutan gambut yang masih rancu, karena apabila kebijakan dilaksanakan maka semua perusahaan yang mengelola HTI akan dicabut izin pengelolaannya, begitu juga masyarakat yang mengolah lahan gambut, hal ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan yang baru karena sebagian besar lahan yang ada di Kabupaten Bengkalis merupakan lahan gambut.

Solusi Kebijakan

Solusi kebijakan terkait dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Kebijakan yang diambil melihat bagaimana pemerintah mengendalikan kebakaran hutan dan lahan agar tidak terjadi dari tahun ketahun. Artikel yang membahas solusi kebijakan juga dilihat dari artikel yang membahas masalah kebijakan, karena narasi yang dibuat oleh aktor kebijakan yang berbicara mengenai masalah kebijakan juga berbicara mengenai solusi dari masalah tersebut. Dari hasil analisis narasi yang sudah dikodekan, tidak banyak yang berbicara mengenai solusi kebijakan, hal yang paling banyak dibicarakan adalah penegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran baik itu individu maupun korporasi. Solusi lainnya adalah himbauan agar tidak melalukan pembakaran dalam membuka lahan pertanian. Dalam narasi yang berbicara mengenai solusi dapat dikodekan karakter dari aktor yang membicarakan solusi sebagai pahlawan, namun tidak semua aktor masuk dalam kategori pahlawan. Karakter korban juga dapat ditemukan dalam narasi solusi kebijakan.



Gambar 2. Solusi Kebijakan

Gambar 2 menunjukkan bahwa solusi kebijakan yang ditemukan pada media yaitu menyarankan pemerintah untuk menetapkan program jangka pendek dan jangka panjang dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Narasi berikutnya yang membahas solusi kebijakan adalah kewajiban bagi perusahaan untuk mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang berada di wilayah milik perusahaan tersebut. Ketegasan pemerintah juga dinarasikan pada media sebagai solusi yang disarankan dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan terutama ketegasan pemerintah untuk mencabut izin penggunaan lahan oleh perusahaan yang terbukti melakukan kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Solusi berikutnya yang ditawarkan oleh para aktor kebijakan adalah adanya kebijakan yang lebih rinci mengenai pemberian izin penggunaan lahan bagi perusahaan yang menggunakan lahan terutama dilahan gambut.

Dari analisis yang dilakukan pada artikel di media ditemukan bahwa media juga berperan dalam menggambarkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan juga menggiring opini masyarakat dengan memunculkan berita-berita sehingga masyarakat dapat menilai bagaimana peran pemerintah, siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Penggunaan media sebagai sumber data sangat bermanfaat dalam melihat kasus kebakaran hutan dan lahan karna narasi media menyajikan dalam berbagai sudut pandang, sehingga peneliti dapat menilai karakter yang berbicara dan dibicarakan dalam artikel.

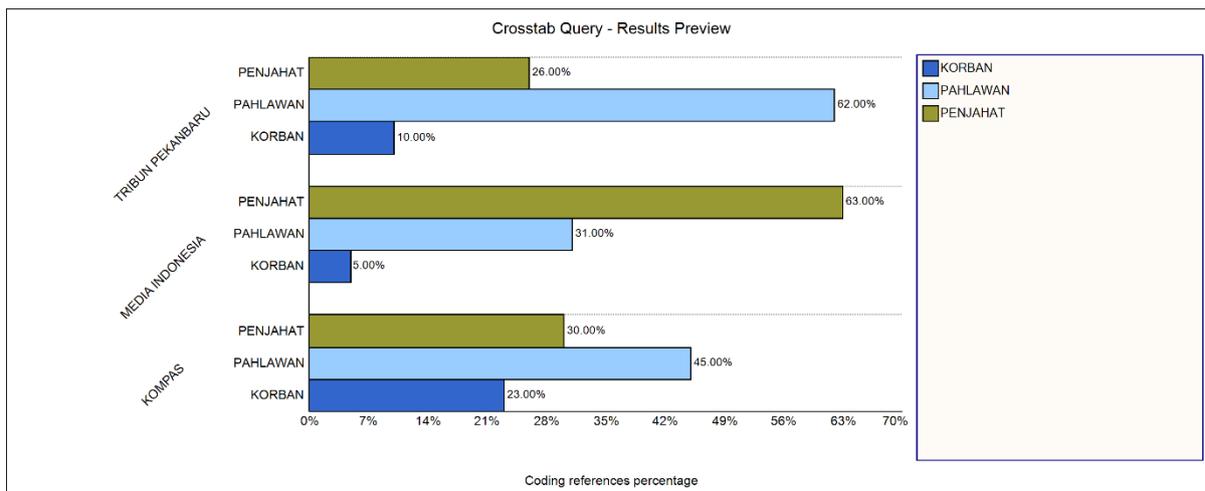
Karakter

Karakter merupakan elemen penting yang harus dibahas dalam penelitian naratif, karakter yang akan dilihat adalah pahlawan, penjahat dan korban. Narasi kebijakan pada media akan berbicara tentang siapa pahlawan, siapa penjahat dan siapa korban dari kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Karakter dimunculkan dalam penelitian bertujuan sebagai salah satu komponen utama narasi yang dapat berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. Jika seseorang mengidentifikasi dengan atau bersimpati kepada karakter dalam narasi, maka penerima (audiens) cenderung menemukan bahwa narasi lebih persuasif (Jones, Shanahan, dan McBeth 2014).

Pada masalah kebijakan yang sulit dicarikan solusinya, aktor dan pelaku kebijakan akan menarasikan diri mereka sebagai pahlawan dan lawannya menjadi penjahat untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang akan dibuat. Karakter pahlawan muncul pada saat menarasikan masalah kebakaran hutan dan lahan dan bersimpati kepada korban asap yang ditimbulkan. Karakter penjahat muncul pada saat media menarasikan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, selain itu karakter penjahat juga muncul pada saat actor kebijakan membicarakan lawannya terutama yang ikut berperan dalam membuat kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pahlawan, Penjahat, dan Korban.

Ada 20 artikel yang membahas korban kebakaran hutan dan lahan, yang menjadi korban adalah masyarakat yang sakit akibat menghirup asap, korban lainnya adalah perusahaan yang lahannya terbakar akibat api yang menjalar dari lahan atau hutan yang ada disebelah lahan mereka, kemudian binatang-binatang yang hidup di hutan juga dikategorikan sebagai korban karena mereka kehilangan tempat tinggal mereka bahkan ada yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan.



Pada media Tribun Pekanbaru ditemukan 10% artikel yang membahas mengenai karakter korban, 62% membahas pahlawan dan 10% membahas penjahat. Pahlawan dan penjahat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pahlawan muncul dari pemadam kebakaran, manggala agni, perusahaan dan actor kebijakan. Penjahat muncul dari pelaku pembakaran baik individu maupun dari korporasi dan hakim yang memutuskan persidangan tersangka pembakaran.

Pemerintah masuk dalam kategori pahlawan (misalnya, untuk datang ke lokasi bencana, menghibur korban, mensponsori undang-undang bantuan bencana), seperti presiden Jokowi, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang datang ke lokasi, gubernur dan Kepala BNPB. Namun pada beberapa artikel menggambarkan kepala daerah sebagai penjahat dikarenakan lambannya proses penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Seperti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Junjung Tambunan yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah lamban dalam menanggapi status darurat bencana sehingga BNPB tidak dapat melakukan tindakan cepat dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan, Cuaca seperti hujan masuk dalam kategori pahlawan karena berperan dalam pemadaman api. Korban yang banyak diceritakan adalah masyarakat yang merasakan dampak dari asap, binatang yang ada di hutan yang kehilangan habitatnya, perusahaan yang lahannya ikut terbakar.

4. KESIMPULAN

Proses kebijakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh narasi media, pada media ditemukan narasi yang dikemukakan oleh aktor-aktor kebijakan berupa masalah kebijakan, solusi kebijakan dan adanya karakter-karakter yang diperankan oleh aktor-aktor tersebut. Masalah kebijakan yang dibicarakan pada media membahas mengenai proses hukum yang tidak berjalan terhadap pelaku pembakaran, kemudian perusahaan-perusahaan yang menjadi tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan tidak ditindak dengan tegas dan penegakkan hukum yang tebang pilih. Karakter yang ditemukan pada aktor yang menarasikan kebijakan adalah pahlawan, penjahat dan korban, pahlawan yang banyak dibicarakan adalah petugas pemadam kebakaran, manggala agni, masyarakat peduli api, actor politik yang memperjuangkan masyarakat dan mengkritik pemerintahan serta pemerintah pusat yang mengecam pemerintah daerah yang lamban dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Penjahatnya terdiri dari pemerintah daerah yang lalai, perusahaan yang menjadi tersangka pembakaran

lahannya dan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, kemudian yang menjadi korban adalah masyarakat yang mendapatkan dampak akibat asap yang ditimbulkan.

5. SARAN

Adapun saran yang diberikan kepada pemerintah yaitu menetapkan program jangka pendek dan jangka panjang dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan, kemudian kewajiban bagi perusahaan untuk mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang berada di wilayah milik perusahaan tersebut dan ketegasan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan terutama ketegasan pemerintah untuk mencabut izin penggunaan lahan oleh perusahaan yang terbukti melakukan kesalahan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrian, N., Widayati, D., Setyorini, D., Akmalafrizal@gmail.com, E., Ilmu, J., Masyarakat, K., ... Kesehatan, I. (2017). No Title ب.ب.ب.ب.ب.ب. □□□□□□, *I*(1), 1–10. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- [2] Asteriniah, F., & Sutina. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran. *Abdimas Mandiri*, *1*(2), 165–186.
- [3] Blair, B. D., & McCormack, L. (2016). Applying the narrative policy framework to the issues surrounding hydraulic fracturing within the news media: A research note. *Research and Politics*, *3*(1). <https://doi.org/10.1177/2053168016628334>
- [4] Budiningsih, K. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *14*(2), 165–186.
- [5] Ceccoli, S. (2019). “The Language We Use Matters”: Streams, Narratives, and the Obama Administration Drone Strike Program in Yemen. *Presidential Studies Quarterly*, *49*(3), 498–526. <https://doi.org/10.1111/psq.12526>
- [6] Crow, D. A., Lawhon, L. A., Berggren, J., Huda, J., Koebele, E., & Kroepsch, A. (2017). A Narrative Policy Framework Analysis of Wildfire Policy Discussions in Two Colorado Communities. *Politics and Policy*, *45*(4), 626–656. <https://doi.org/10.1111/polp.12207>
- [7] Dupuis, N. (2019). Stories of the sharing economy: Policy narratives surrounding the entry of transportation network companies into four mid-sized American cities. *Critical Policy Studies*, *13*(3), 306–327. <https://doi.org/10.1080/19460171.2018.1437459>
- [8] Hasle, P., Bojesen, A., Jensen, P. L., & Bramming, P. (2012). Lean and the working environment: A review of the literature. *International Journal of Operations and Production Management*, *32*(7), 829–849. <https://doi.org/10.1108/01443571211250103>

- [9] Hino, R. F. M. (2014). Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 1(4):47-59(4), 47. Retrieved from www.juliwi.com
- [10] Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2020). Narrative in the Time of Trump: Is the Narrative Policy Framework good enough to be relevant? *Administrative Theory and Praxis*, 42(2), 91–110. <https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1750211>
- [11] Jones, M. D., & Radaelli, C. M. (2015). The Narrative Policy Framework: child or monster? *Critical Policy Studies*, 9(3), 339–355. <https://doi.org/10.1080/19460171.2015.1053959>
- [12] Knackmuhs, E., Farmer, J., & Knapp, D. (2020). The Interaction of Policy Narratives, Moral Politics, and Criminal Justice Policy Beliefs. *Politics and Policy*, 48(2), 288–313. <https://doi.org/10.1111/polp.12343>
- [13] McBeth, M. K., & Pearsall, C. A. (2019). Using the Narrative Policy Framework in the Teaching of Introduction to Politics. *Journal of Political Science Education*, 0(0), 1–17. <https://doi.org/10.1080/15512169.2019.1682594>
- [14] Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan Fachmi Rasyid A. Pendahuluan. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, (4), 47.
- [15] Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2018). How to conduct a Narrative Policy Framework study. *Social Science Journal*, 55(3), 332–345. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.12.002>
- [16] Smith-Walter, A., Jones, M. D., Shanahan, E. A., & Peterson, H. (2020). The stories groups tell: campaign finance reform and the narrative networks of cultural cognition. In *Quality and Quantity* (Vol. 54). <https://doi.org/10.1007/s11135-019-00884-8>
- [17] Stephan, H. R. (2020). Shaping the Scope of Conflict in Scotland’s Fracking Debate: Conflict Management and the Narrative Policy Framework. *Review of Policy Research*, 37(1), 64–91. <https://doi.org/10.1111/ropr.12365>
- [18] Sukrismanto, E. (2012). *Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*.
- [19] Sukrismanto, E., Alikodra, H. S., Saharjo, B. H., & Kardono, P. (2011). Hubungan Antar Organisasi Dalam Sistem Pengorganisasian Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 8(3), 169–177. <https://doi.org/10.20886/jpht.2011.8.3.169-177>
- [20] Sulistyowati, L. S. (2017). *Kebijakan Pengendalian Dm*. 121–130.
- [21] Walker, H. M., Reed, M. G., & Fletcher, A. J. (2020). Wildfire in the news media: An intersectional critical frame analysis. *Geoforum*, 114(September 2019), 128–137. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.06.008>